



IDENTITAS INDONESIA DALAM TELEVISI, FILM DAN MUSIK

Editor

Dr. Heri Budianto, S.Sos., M.Si.

Dr. Leila Mona Ganiem, M.Si.

Dewi Sad Tanti, S.Sos., M.Si.

PENERBITAN & PEMERINTAH

pus ombis

EDUKASI DAN KULTUR

ASPIKUM

BNI

infomedia

MIX

APM

MENGKAJI DINAMIKA KOMUNIKASI DI INDONESIA

Catatan Pengantar

Dr. Eko Harry Susanto

Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM)
e-mail: ekohs@centrin.net.id

Dalam dinamika arus pesan yang kompleks, pada satu sisi memberikan kepuasan memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai pijakan hubungan antar manusia yang beretika. Namun pada kutub lain, betapa masyarakat menjadi gamang ketika memperoleh pesan yang justru melembagakan ketidakpastian terhadap berbagai peristiwa yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian wajar, jika Samovar, Porter dan McDaniel, 2010:24) mengungkapkan, komunikasi itu kompleks karena dimensi faktual, budaya dan simbol berada di dalamnya.

Padahal kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam menyerap-paikan informasi secara ideal harus berpijak kepada pengorganisasian pesan yang baik dengan memberikan nilai faktual dan kejelasan. Bukan menyuarakan ketidakpastian yang memicu konflik. Terlebih lagi dalam dinamika komunikasi global yang mengeksplorasi pesan dan simbol dalam kemajemukan nilai, sikap dan kepercayaan, maka informasi, pesan dan berita yang didiseminasi kepada khalayak harus memiliki landasan etika komunikasi, demi menjaga relasi positif pihak-pihak yang berinteraksi.

Menyikapi kompleksitas informasi dari sumber pesan yang diasumsikan berdampak negatif dan berlebihan, karena tidak berpijak kepada kebenaran, maka pengembangan bidang ilmu komunikasi yang berlandaskan kepada etika ilmu pengetahuan, hubungan antar manusia dalam konteks bisnis maupun politik harus ditegakkan. Komunikasi yang menjunjung tinggi kesantunan, punuh dengan empati menjadi salah satu prinsip untuk menyikapi dinamika komunikasi yang tidak dibatasi oleh faktor geografis, kultural dan jarak ideologis dalam mewujudkan manfaat yang sesungguhnya.

Memang bukan jalan mudah untuk menempatkan komunikasi selalu pada poros positif yang memberikan manfaat dalam hubungan antar manusia. Sebab, hegemoni aliran pesan yang sedemikian bebas dan didukung teknologi komunikasi, seringkali lebih leluasa untuk menyebarkan aneka pesan yang keliru dibandingkan dengan pesan yang sudah diorganisasikan secara baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, ketidakberdayaan menghadapi dinamika informasi, bukan berarti

kita setuju terhadap para pemilik otoritas di tubuh pemerintah yang berupaya untuk mengendalikan kebebasan bicara, berpendapat dan berekspresi, demi untuk kepentingan kekuasaan secara integralistik. Sebab hakikatnya membentuk masyarakat demokratis dalam koridor terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera secara moral dan material, harus menjunjung kebebasan berekspresi, kemerdekaan komunikasi dan transparansi informasi dalam kehidupan bernegara.

Tidak dapat dikesampingkan, reformasi politik telah mendorong tumbuh dan berkembangnya kebebasan berkomunikasi. Melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mengupayakan kemerdekaan pers, dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merupakan upaya untuk memasuki masyarakat informasi yang sesungguhnya. Selain itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengamanatkan keterbukaan informasi untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), membangun kebebasan berekspresi menjadi semakin memperoleh ruang yang memadai.

Walaupun tentu saja pelaksanaan kebebasan komunikasi dengan mengutamakan demokrasi dan transparansi informasi tidak mudah dijalankan, mengingat sekelompok masyarakat, institusi negara dengan sejumlah subordinat kekuasaannya, masih menyukai pelembagaan ketertutupan yang serba rahasia. Bagaimanapun sulitnya mengedepankan komunikasi yang transparan, tetapi bidang ilmu komunikasi harus mampu mendorong terbentuknya masyarakat informasi yang terbuka dan menghargai keberadaban komunikasi dalam bingkai kemajemukan global.

Bagaimanapun juga dalam kompleksitas informasi, fokus interaksi antar manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungannya dalam kutub komunikasi yang baik harus tetap harus dipelihara kesantunannya. Samovar, Porter dan McDaniel (2010: 24), mengatakan, komunikasi memang harus bertanggungjawab dan beretika. Dengan demikian, komunikasi dengan segala kekuatan melalui sumber pesan dan kualitas informasi, merupakan pilar pendukung kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Oleh sebab itu kebebasan berekspresi pada lingkup global, harus mampu menyuarakan eksistensi keindonesiaan yang beretika dan transparan kepada khilayak dunia. Bukan sebaliknya, dalam belenggu kultur paternalistik dan jargon datar harmonisasi informasi, berbagai entitas yang memiliki otoritas sosial, ekonomi dan politik di masyarakat maupun pemerintahan, lebih menyukai untuk mengungkapkan pesan tidak faktual yang merujuk kepada kepentingan kelompok dalam perspektif sektarianisme, etnosentrisme,

komunalisme dan semangat subnasional.

Sesungguhnya, kalaupun serangan globalisasi informasi mengkhawatirkan nilai sosial kultural sebagai landasan ekonomi, bisnis politik bangsa Indonesia, tetapi tidak sepatutnya mengeluh terhadap serbuan internasionalisasi informasi. Sebab sebagaimana dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia yang dapat menyikapi berbagai dinamika informasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bukan hanya mengeluh, berprasangka dan melakukan aneka macam tindakan yang sesungguhnya tidak popular jika dikaitkan dari sudut kekuatan teknologi komunikasi.

Namun persoalannya, ternyata asumsi komunikasi global sebagai biang keladi menipisnya ke-Indonesian justru cenderung lebih dipercaya oleh pemilik otoritas di nusantara. Dengan dukungan teknologi komunikasi, para pemilik otoritas di tubuh pemerintah berupaya melakukan pembatasan informasi yang jelas-jelas tidak terlalu efektif merangkal pengaruh informasi internasional dan pesan-pesan global.

Kendati demikian, ada upaya lain yang memiliki dampak baik bagi masyarakat, tindakan membangun pusat-pusat komunikasi yang mampu menjelajah serta menjangkau kawasan di perbatasan untuk mengimbangi kekuatan informasi dari negara lain. Memang tidak bisa disangkal wilayah perbatasan tidak mudah dijangkau oleh informasi dari pusat kekuasaan dan ekonomi. Akibatnya warga setempat buta terhadap beragam informasi tentang Indonesia, tetapi justru menikmati beragam informasi dari negara lain yang memiliki kekuatan komunikasi sampai pelosok tanah air Indonesia. Namun menjadi pertanyaan, apakah informasi dari sumber kekuasaan politik dan bisnis di Indonesia mampu mempengaruhi perilaku warga negara Indonesia untuk lebih perhatian terhadap negaranya.

Tentu harus dicermati proporsional, sebab pasokan informasi yang menyuarakan tentang kesejahteraan dan kemakmuran negara, akan dikomparasikan dengan kondisi nyata yang dihadapi warga perbatasan bagaimana pemerintah memperhatikan kesejahteraan moral dan material. Karena itu, bukan hal yang mengherankan jika warga perbatasan dengan negara lain, cenderung lebih mengenal negara lain yang secara faktual membuka kesempatan dan memberikan berbagai kemudahan serta fleksibilitas dalam hal mencari penghidupan yang lebih baik.

Pada konteks ini, ternyata komunikasi yang hanya mengeksplorasi informasi yang tidak disertai bukti nyata, sulit untuk bisa mampu mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak. Karena itu, ilmu komunikasi harus mampu memberikan nilai-nilai integritas agar pesan-pesan yang disebarluaskan berpijak kepada kejujuran dan keterbukaan sebagai landasan keberadaban

dalam menyampaikan pesan kepada khalayak yang majemuk. Keberadaban komunikasi adalah upaya untuk menyampaikan informasi yang faktual tanpa reduksi untuk kepentingan sepihak, jadi bukan kampanye negatif, propaganda, perilaku dramaturgi, dan represi terselubung untuk mengendalikan informasi dengan dalih demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan bermasyarakat.

Secara esensial, membangun masyarakat informasi bukan sebatas meningkatkan kapasitas jaringan, kses teknologi komunikasi yang mudah dijangkau, dan menciptakan belantara peraturan bidang komunikasi, tetapi membentuk masyarakat yang adaptif terhadap informasi adalah menegakkan integritas, mengunggulkan keterbukaan informasi, dan menciptakan komunikasi yang sepadan dengan masyarakat. Pada tataran akademis, ilmu komunikasi harus mampu mendukung kebebasan berekspresi demi untuk mencapai kesejahteraan, keadilan dan keberadaban dalam berbangsa dan bernegara (Susanto, 2013:xi).

Karena itu, dengan segala kompleksitas yang melekat pada komunikasi, maka pendidikan tinggi ilmu komunikasi harus senantiasa peduli dan sensitif terhadap perubahan maupun perkembangan social budaya, ekonomi dan politik dalam skala nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, dalam buku ini, topik Komunikasi Indonesia untuk Membangun Peradaban Bangsa, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih detil seputar dinamika komunikasi dengan segala kompleksitas yang melekat di dalamnya. Atau setidak-tidaknya, kita bisa memperoleh informasi tentang posisi Indonesia dalam komunikasi internasional yang semakin dinamis dan terperangkap dalam pengkutuhan aliansi kekuatan politik dan bisnis global. Sedangkan masalah film dan musik Indonesia yang harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri menarik untuk ditelaah mengingat serbuan film impor yang mendominasi pasar khalayak nusantara.

Tentu saja dalam dinamika komunikasi yang kompleks tersebut diatas, keberadaban komunikasi yang berpijak kepada etika, transparansi, konsistensi dan integritas, harus menjadi landasan dalam mengembangkan ilmu komunikasi. Tujuannya agar ilmu komunikasi mampu memberikan kesejahteraan kepada semua lapisan masyarakat tanpa diferensiasi. Lebih khusus lagi ilmu komunikasi diharapkan bisa memberikan manfaat bagi warga atau masyarakat yang terpinggirkan dalam kontestasi social ekonomi dan politik yang tidak berimbang, serta jauh dari kesepadan.

Oleh sebab itu, hal yang wajar jika komunikasi sebagai proses yang resiprokal dan berkelanjutan dengan semua pihak yang terlibat saling berkaitan dalam menciptakan makna bersama (Baran, 2012:6), dituntut untuk membangun semangat integratif yang mengedepankan nilai kebhinekaan, kemajemukan, dan selayaknya kalu berupaya meminimalisir nilai sektarian, komunalisme,

etnosentrisme dan semangat sub-nasional di era kebebasan dan kemerdekaan berekspresi justru dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan menarik simpati rakyat. Jelas ini tugas berat bagi para akademisi, praktisi komunikasi dan semua pihak yang selalu berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan komunikasi dan informasi dengan segala kompleksitasnya.

Daftar Pustaka

- Samovar, Larry A, Richard E.Porter dan Edwin R.McDaniel.2010. Komunikasi Lintas Budaya, atau *Communication Between Cultures* terjemahan Indri Margaretha Sidaibalok, Jakarta : Penerbit Salemba Humanika
- Baran, Stanley J.2012. *Introduction to Mass Communication : Media Literacy and Culture* atau Pengantar Komunikasi Massa : Melek Media dan Budaya, Jilid 1 Edisi 5, terjemahan S. Rouli Manalu, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Susanto, Eko Harry. 2013. Kompleksitas Pendidikan Komunikasi, dalam *Communication Review: Catatan Tentang Pendidikan Komunikasi di Indonesia, Jerman dan Australia*, editor Setio Budi HH, Yogyakarta : Penerbit Buku Litera, Aspikom dan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

KOMUNIKASI INTERNASIONAL DALAM PELEMBAGAAN BUDAYA INDONESIA

Dr. Eko Harry Susanto

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta
e-mail: ekohs@centrin.net.id

ABSTRAK

Upaya melembagakan budaya melalui komunikasi internasional menjadi kewajiban semua pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga kebudayaan nusantara. Mengunggulkan budaya adalah pekerjaan yang nyata dan hasilnya dapat dilihat oleh masyarakat internasional. Dengan demikian, klaim sepihak berbagai kekayaan budaya bangsa Indonesia oleh negara lain, bukan dihadapi melalui argumentasi yang berlindung di balik aspek historis, pengakuan masa lalu dan dalih lain yang bersumber kepada kelaziman maupun tradisi. Tanpa upaya komunikasi internasional yang dikelola dengan baik, maka kebudayaan Indonesia akan kehilangan eksistensinya dalam lalu lintas informasi kebudayaan bangsa-bangsa di dunia yang gencar disuarakan.

Kata Kunci : komunikasi internasional, pengorganisasian pesan, kebudayaan

Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam dari tradisi, simbol maupun visualisasi lain yang melekat dalam karakter masyarakat. Berbagai produk hasil kebudayaan dalam konteks historis, sejak nenek moyang bangsa Indonesia sampai produk budaya dalam bingkai kekinian menjadi warisan yang harus dipertahankan eksistensinya agar tidak tergenus oleh perkembangan yang lebih berorientasi kepada keuntungan material semata-mata.

Upaya mempertahankan kebudayaan sebagai warisan bangsa yang berharga, memerlukan kerja keras yang terintegrasi dalam pola komunikasi yang menunjukkan kepedulian untuk menjaga harta yang tidak terenilai harganya. Tindakan untuk menjaga kekayaan budaya, bukan sebatas membangun kesadaran manusia Indonesia agar peduli terhadap budaya bangsa, tetapi juga

diarahkan kepada masyarakat internasional di seluruh penjuru dunia.

Tujuannya jelas, agar masyarakat internasional, yang diikat oleh komunikasi global tanpa batas geografis dan kultural, mengakui kekayaan budaya bangsa Indonesia. Sebab, dalam jaringan komunikasi tanpa batas, masyarakat dunia bukan mustahil tidak mengerti bahwa salah satu produk budaya yang mereka kenal bukan berasal dari Indonesia, tetapi dari negara lain yang lebih agresif dalam menyuarakan perlindungan terhadap kebudayaan negaranya.

Kebudayaan hasil cipta, karsa manusia sebagai jatidiri bangsa, yang merepresentasikan karakter dan nilai-nilai dalam masyarakat. Karena itu kekuatan nilai budaya identik dengan ketahanan, kreativitas dan semangat masyarakat suatu negara. Dalam koridor globalisasi, kebudayaan dan produk hasil budaya, dapat menjadi andalan untuk menarik investasi dan kunjungan wisata. Bahkan kebudayaan sebagai alat kompetisi yang mampu memperebutkan pengaruh dalam penyelenggaraan seremoni ataupun perhelatan internasional. Dengan kata lain, kebudayaan dapat menarik perhatian dalam penyelenggaraan even dunia.

Jadi pada hakikatnya, kebudayaan dapat mendatangkan manfaat yang mampu memendorong tercapainya kesejahteraan rakyat. Kendati demikian, bukan berarti kebudayaan dikomersialisasikan demi meraih materi, tetapi bagaimana kebudayaan dan produk budaya menjadi daya tarik masyarakat dunia tanpa merusak eksistensi budaya beserta nilai-nilai positif yang melekat didalamnya. Namun persoalannya, tidak mudah membangun kesadaran untuk peduli terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Celakanya, kesulitan ini bukan hanya melekat pada masyarakat kebanyakan, tetapi juga pada para pemegang otoritas yang bertanggungjawab terhadap terpeliharanya kebudayaan dan produk budaya sebagai warisan bangsa Indonesia yang bernilai tinggi.

Munculnya berbagai klaim budaya dan hasil produk budaya Indonesia oleh Malaysia, bukan semata-mata kesalahan rakyat yang tidak peduli terhadap pelembagaan budaya asli Indonesia, tetapi juga ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi komunikasi internasional yang menguasai masyarakat global. Upaya pemeliharaan kebudayaan masih bersifat angin-anginan dan parsial dan bersifat reaktif tanpa merujuk kepada strategi komunikasi yang dapat memberikan kesadaran kepada rakyat tentang perlunya menjaga warisan budaya bangsa.

Bantahan dan ajakan kepada rakyat untuk menolak klaim sepihak dan negara tetangga, justru lebih banyak terperangkap untuk mencari dukungan rakyat Indonesia dibandingkan mencari dukungan masyarakat internasional. Disisi lain, merananya aneka kesenian tradisional dan terpuruknya hasil produksi budaya yang tidak, jelas menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap warisan kebudayaan nasional yang sangat berharga bagi ketahanan sosial-kultural bangsa.

Indonesia. Institusi yang menangani kompleksitas dan dinamika kebudayaan dalam era teknologi komunikasi, masih terperangkap dalam kerja birokrasi yang menjauhkan dengan mengandalkan komunikasi linier yang tidak mengakar di masyarakat sebagai subyek dan obyek dari kebudayaan itu sendiri. Jadi secara substantif, pemeliharaan kebudayaan dan produk hasil budaya bangsa Indonesia, harus berpijakan kepada pola komunikasi yang mengorganisasikan pesan kepada masyarakat Indonesia agar peduli dan menghargai budaya bangsa. Sedangkan pesan bagi khalayak global, difokuskan untuk memberikan informasi faktual tentang budaya bangsa Indonesia, yang terawat dengan baik dan memperoleh perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah.

Ketergantungan dalam Komunikasi Global

Secara substansial, komunikasi untuk mendifusikan pesan-pesan kebangsaan budaya bangsa Indonesia, bukan sebatas mengeksplorasi berita untuk pengaruh khalayak internasional tanpa disertai tindakan nyata dalam melihara budaya, dengan segala produk hasil kebudayaan yang melekat. Bisa disangkal, dalam forum global, pesan yang disampaikan akan adapan dengan informasi dari negara lain yang juga berupaya menguasai aspek kebudayaan dunia. Terlebih lagi, masyarakat internasional bisa saja tidak percaya kepada pemberitaan yang diproduksi oleh entitas negara maju, bandingkan dengan pesan yang diproduksi dan dikelola oleh negara-negara yang berkembang yang dinilai kurang transparan.

Kekurangpercayaan masyarakat internasional juga dipicu pula oleh bagaimana pemberitaan tentang ketimpangan kesejahteraan negara sedang berkembang ataupun negara perifer seperti kemiskinan, kelaparan, buruknya kesehatan, pertambahan penduduk tidak terkendali dan sejumlah problem sosial, ekonomi serta politik di negara Dunia Ketiga. Di sisi lain surplus pangan, uang finansial serta teknologi menjadikan negara maju mempunyai posisi yang sangat kuat untuk mendikte negara berkembang dalam berbagai urusan. (Christ, 1983 : 243).

Dengan rujukan tingkat kesejahteraan dan ketergantungan negara yang berkembang, maka masyarakat internasional menilai informasi yang berasal dari negara berkembang tidak akurat, terlebih lagi jika dikeluarkan dan diorganisasikan oleh pemerintah, yang terbiasa dalam mengemas pesan untuk masyarakat demi pencitraan semata.

Posisi yang kuat khalayak dunia, khususnya dari negara maju, membuat peraturan dalam menyampaikan informasi tidak berjalan maksimal. Ketergantungan ekonomi juga merambah pada ketergantungan kebudayaan dan ketergantungan intelektual yang memiliki substansi sama dengan ketergantungan ekonomi. Pada konteks ini, MacBride (1983 : 47)

mengemukakan, "bahwa komunikasi sering sekali merupakan pertukaran dua pihak yang tidak sama tinggi, tetapi menguntungkan yang lebih kuat, lebih kaya dan lebih lengkap fasilitasnya". Perbedaan di dalam kekuasaan dan kekayaan disengaja atau tidak, mempunyai akibat dan pengaruh pada struktur dan arus komunikasi dunia. Disinilah letak ketidak samaan, terjadi perbedaan dan ketidak seimbangan komunikasi internasional dari negara maju yang dominan dan negara berkembang sebagai pihak inferior.

Ketergantungan informasi dan dominasi komunikasi tidak lepas dari Teori Dependensi, yang menganalisis ketergantungan negara sedang berkembang terhadap negara maju. Pola ketergantungan pada umumnya merugikan keberhasilan pembangunan social, ekonomi dan budaya di negara dunia ketiga. Sebab surplus ekonomi yang terus menerus dari negara pinggiran (periferi) ke negara maju, tidak terpisahkan dari hegemoni kekuasaan kolonial dan ketergantungan industri dan keuangan (Suwarsono dan So, 1991 : 107).

Dalam hal lalu lintas informasi dunia, khususnya berita kebudayaan atau warisan budaya satau negara, maka informasi lebih banyak diorganisasikan oleh berbagai entitas di negara maju untuk disebarluaskan kepada masyarakat dunia. Menilik di Indonesia, perdebatan terhadap warisan budaya bangsa yang diklaim oleh negara tetangga, para pemegang otoritas di pemerintahan, cenderung berputar pada kelaziman historis yang gaungnya lebih kuat di negeri sendiri dibandingkan sasaran utama yaitu masyarakat internasional.

Kalaupun yang mengklaim warisan budaya Indonesia adalah Malaysia sebagai negara tetangga yang kurang lebih mempunyai posisi sama sebagai negara berkembang, tetapi masyarakat internasional tampaknya lebih familiar karena informasi yang dikeluarkan oleh sejumlah pihak melalui media massa mainstream dan media sosial, diorganisasikan untuk memasok kebutuhan informasi masyarakat internasional. Artinya bukan semata-mata untuk membangun kebanggaan masyarakat setempat terhadap kebudayaan yang dimiliki.

Jika mencermati media massa dan media sosial untuk menolak klaim Malaysia, sudah jaman jika muncul dalih sangat standar dalam komunikasi internasional. Bahkan media sosial lebih sering mengeksplorasi kejengkelan dan ekspresi ketidakpuasan yang sarkasme kepada negara tetangga yang kahirmnya lepas dari konteks untuk memberikan informasi kepada masyarakat internasional, bahwa yang diklaim oleh Malaysia tidak benar.

Padahal negara yang mengklaim produk budaya Indonesia, melakukannya dengan menyebarkan informasi melalui jaringan yang dikelola merujuk kepada kehendak pemerintah untuk mempopulerkan produk budaya untuk konsumen internasional. Misalnya, pengakuan tentang angklung sebagai budaya Malaysia ada dalam situs www.musicmall_asia.com. Disebutkan bahwa angklung berasal

Malaysia, tepatnya berada di kota Johor. Musik angklung merupakan simping kesenian kuda kepang (<http://forum.kompas.com/nasional/106600-musik-daftar-kebudayaan-indonesia-yang-diklaim-malaysia.html>, diakses tanggal 13 Februari 2013)

Informasi dari dunia maya sangat dipercaya oleh masyarakat dunia. Dalam konteks ini pendapat seputar media sosial di Amerika Serikat, dapat dipakai bukan yang menggambarkan kredibilitas media alternatif di tingkat global. Menurut Denner (2006:80), orang Amerika Serikat memilih media alternatif karena memerlukan konteks informasi substansial tidak bisa dipenuhi oleh media mainstream. Faktor penyebabnya, salah satunya, adalah komersialisasi produk media atau bahkan hiperkomersialisasi. Intinya, media social menjadi sumber informasi yang kredibel bagi para pencari informasi yang faktual dan transparan.

Mencermati gambaran tersebut, selayaknya jika masyarakat dan pemerintah Indonesia harus bisa bersaing dalam lalu lintas informasi global yang dikuasai dan dipengaruhi oleh negara maju beserta koleganya yang barat. Apalagi Indonesia yang memiliki jumlah pengguna internet mencapai 110 juta atau 22,1 % penduduk (Majalah Tempo, 10 Februari 2013) selayaknya mampu menghadapi dominasi informasi negara-negara core (maju).

Tetapi sayangnya, jumlah pengguna internet tersebut, tidak mewakili kualitas komunikasi internasional yang dapat dipakai untuk melestarikan warisan budaya dunia. Sebab, media social, bagi sejumlah kalangan hanya dimanfaatkan untuk mencari informasi yang tidak bermanfaat dan sebagai bagian gaya hidup yang tidak produktif.

Problem Komunikasi Budaya Indonesia

Dalam hiruk pikuk persoalan klaim Malaysia, sejatinya pemerintah menyadari bahwa kebudayaan harus dilestarikan dalam arti yang membumi, yakni kegiatan parsial dalam jerat aneka macam proyek pemeliharaan budaya yang bersifat elitis kurang menyentuh langsung apa yang diharapkan masyarakat. Pemeliharaan budaya tidak sekadar seremoni dan komunikasi tetapi di berbagai perhelatan yang menunjukkan kepedulian terhadap warisan bangsa Indonesia. Pemeliharaan budaya adalah tindakan faktual yang memberdayakan budaya dan produk kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penolakan klaim dari Malaysia bukan disikapi dengan negatif tetapi argumentasi yang berdasarkan pada kepedulian.

Namun jalan yang paling mudah adalah membangkitkan semangat nasional, akibatnya ketika Lagu Rasa Sayange dan Reog Ponorogo diklaim Malaysia, berbagai kelompok dalam masyarakat memprotes tindakan jiran yang dianggap melecehkan hak atas kebudayaan milik bangsa

Indonesia. Menurut Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Windu Nuryanti, membentang catatan klaim Malaysia atas kekayaan budaya asli Indonesia rentang 2007-2012, sudah tujuh kali, yaitu kesenian reog ponorogo, lagu Rasa Sayange, batik, Tari pendet, musik angklung dan tari tor-tor dan gondang sambilan. (<http://www.antaranews.com/berita/317054/2007-2012-malaysia-klaim-tujuh-budaya-indonesia>, diakses tgl 11 Februari 2013)

Kasus lain yang menenggelamkan posisi Indonesia dalam memelihara kebudayaan adalah pemalsuan arca di Museum Radja Pustaka Surakarta beberapa tahun lalu melengkapi cerita tentang keterpurukan pemeliharaan produk kebudayaan. Orang yang semestinya menjaga warisan kebudayaan unggul, ternyata justru terperangkap oleh kultur material yang menafikan pentingnya warisan masa lalu sebagai benda berharga yang tidak termilai harganya.

Dalam bingkai marginalisasi kebanggaan nasional, timbulnya serentetan kasus yang merugikan kebudayaan nasional, sesungguhnya tidak terlepas dari kelengahan negara yang kurang perhatian terhadap kebudayaan sebagai alat pemersatu. Elite dalam pemerintah dan masyarakat lebih bersyik masyuk dengan nilai yang dipercaya di lingkungannya secara terbatas, dan memarginalkan upaya pelestarian kebudayaan nasional sebagai gerakan massal untuk menghambat praktik pencurian terhadap berbagai produk ekspresi budaya yang ada di Indonesia.

Eksistensi kebudayaan nasional menjadi semakin kompleks, jika kita mengaitkan dengan budaya populer yang sarat dengan nilai material, secara terlembaga didiseminasi oleh media elektronik untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Akibatnya orientasi kebudayaan juga tidak terlepas dari model instan yang mudah diikuti dan lebih menyenangkan walaupun hanya sesaat.

Padahal di sisi lain, sejumlah kecil pembela kebudayaan, bekerja keras untuk mempertahankan kesenian tradisional diantara gemerlap budaya popular yang sarat nilai konsumerisme. Wayang Golek, Wayang Orang, Jaipong dan aneka kesenian tradisional lain terpaksa keliling kampung untuk menghidupi "kebudayaan" luhur. Cerita tentang produk kebudayaan yang terpinggirkan analog dengan sanggar kesenian yang kehilangan murid-muridnya, panggung pertunjukan tradisional yang ditinggal penonton, anak-anak kehilangan permainan tradisional, naskah-naskah kuno berpindah tangan ke orang asing dan berbagai produk ekspresi budaya yang dimarginalkan oleh bangsanya sendiri.

Dalam konteks kegagalan komunikasi internasional melalui media sosial yang didukung oleh teknologi komunikasi antara lain Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah tidak dihiraukan lagi oleh warga dunia sebagai keajaiban

dunia yang baru. Apa alasan substansial terlemparnya candi Budha itu sebagai keajaiban dunia yang baru tentu tidak begitu jelas, sebab penilaian berpijak pada pilihan masyarakat dunia.

Mungkin saja masyarakat internasional menilai bahwa warisan budaya bangsa Indonesia kurang disosialisasikan dalam forum internasional jauh dari standart pelayanan informasi global yang diharapkan masyarakat dunia pengguna media social dan internet. Menghadapi persoalan ini, pemerintah harus menyikapi dengan serius dan mencari sebab musababnya. Dengan demikian bukan bersikap pasif dan berlindung dibalik pernyataan UNESCO yang tidak mengakui tujuh keajaiban dunia versi baru yang didukung teknologi komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat dunia.

Tujuh Keajaiban Dunia baru, yang dipublikasikan bulan Juli 2007, adalah Taj Mahal di India, Reruntuhan Petra Jordania, Tembok Besar di China, Reuntuhan Machu Picchu yang ada di Peru, Koloseum Roma, Reruntuhan Chichen Itza di Meksiko, dan Patung Kristus yang berdiri di Rio de Janeiro, Brasil. Masyarakat ikasi keajaiban dunia tersebut, menyambut dengan pesta para keberhasilan "tinggalan budaya" mereka diakui dunia internasional. Sebaliknya, di Indonesia sebagai pemilik Candi Borobudur hanya terpana diam, meski warisan budaya leluhurnya terpental dari pilihan masyarakat internasional.

Ketidakpedulian terhadap budaya dan kesenian yang terbaru, bagaimana reruntuhan di Museum Haji Widayat yang berisi lukisan bernilai budaya tinggi, mengikuti dalam truk tanpa menghiraukan bahwa salah satu produk budaya tersebut harus diperlakukan dengan baik. (Majalah Tempo, Januari 2013). Kritika ini, jelas akan menyudutkan posisi Indonesia di forum internasional memelihara warisan kebudayaan.

Berpijak pada persoalan tersebut diatas, pemerintah dan masyarakat sendiri membangun semangat kolektif untuk peduli terhadap kebudayaan sendiri, memelihara dan menyuarakan di forum internasional tentang kekayaan kebudayaan yang bisa dinikmati oleh warga dunia. Dengan demikian, negara asing tidak bisa sewenang-wenang mengklaim produk ekspresi budaya yang notabene sebagai kekayaan bangsa Indonesia sebagai milik mereka. Namun persoalannya, dalam koridor kebebasan pers, menciptakan kebersamaan mempertahankan kebudayaan, akan tiba-tiba dengan cengkeraman budaya populer instan yang tersebar merata di seluruh tanah air. Padahal, perhelatan ataupun pesta kebudayaan yang diorganisir atas nama bangsa Indonesia hampir tidak pernah terdengar lagi. Lebih celaka lagi, pelayanan kepada masyarakat internasional untuk menggali kebudayaan, selalu terperosok dalam nuansa "biaya siluman", yang membuat warga dunia mengabaikan keajaiban budaya Indonesia.

Melembagakan Budaya di Forum Internasional

Kekuasaan informasi secara faktual masih dikendalikan oleh negara maju, dinamika informasi dalam komunikasi internasional adalah hegemoni negara core untuk kepentingan sendiri dan sekutunya. Dalam komunikasi internasional, kekuasaan informasi adalah gambaran kekuatan negara maju dan ketergantungan negara sedang berkembang, yang belum memiliki kemandirian dalam mengelola problem social-budaya, ekonomi dan politik.

Kekuasaan dalam komunikasi dan dinamika politik internasional memiliki dimensi situasional, perubahan, hubungan, potensi, konversi ekonomi, (Henderson, 1998: 100-102). Khusus terkait dengan perubahan, kekuasaan adalah kekuatan berubah yang didukung oleh teknologi komunikasi untuk mengontrol. Sedangkan konversi kekuasaan ekonomi dapat menjadi kemampuan militer dan selanjutnya menjadi kekuasaan politik dalam forum internasional.

Berpijak kepada fakta kekuasaan informasi masih melekat pada kekuatan negara maju, maka pesan dari negara marginal tidak direspon dengan baik oleh masyarakat internasional. Melalui media global, opini publik yang dibangun negara maju dapat berkembang dengan cepat dan lebih dipercaya karena dikaitkan dengan kredibilitas sumber informasi yang memadai.

Membangun komunikasi internasional harus memberikan pemahaman kepada masyarakat global tentang budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Fokus utama adalah mengeksplorasi keragaman dan kekayaan budaya nusantara. Dengan demikian bukan semata-mata dikaitkan dengan klaim Malaysia terhadap sejumlah budaya Indonesia.

Menarik dicermati pendapat Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menagatakan, suatu produk budaya dan seni warisan leluhur bangsa idealnya dipatenkan secara internasional. Meskipun suatu produk budaya dan seni telah diakui milik Indonesia, perlu dipatenkan secara internasional. Upaya itu untuk menghindari klaim dari bangsa lain (<http://www.antaranews.com/berita/1251213425/sultan-produk-budaya-idealnya-dipatenkan-internasional>, diakses tgl 12 Februari 2013).

Pernyataan Sultan dapat ditafsirkan bahwa, budaya harus terus diperlakukan dan dilembagakan secara terus menerus sebagai warisan bangsa Indonesia yang berharga. Agar masyarakat internasional juga memahami eksistensi budaya Indonesia harus dipatenkan agar negara lain tidak mengklaim budaya maupun produk budaya Indonesia. Namun upaya kearah mematenkannya hendaknya diikuti pula dengan mengkomunikasikan aneka budaya Indonesia di forum internasional, sehingga masyarakat global semakin mengerti dan memahami kepemilikan budaya Indonesia.

Melembagakan budaya bangsa dalam forum internasional yang dia-

masyarakat dunia, harus mempublikasikan kondisi faktual, jadi bukan klise dalam kemasan pencitraan yang tidak didukung oleh bukti nyata yang tindakan negara yang melindungi budaya nasional. Singkatnya, pelembagaan budaya harus disertai dengan kerja keras yang konkret dan upaya memelihara warisan budaya bangsa Indonesia yang seringkali diispikan unggul dan bernilai tinggi.

Kita juga tidak bisa menafikan eksistensi komunikasi internasional berbasis kepada teknologi komunikasi. Jaringan global itu harus diakutik untuk mengkomunikasikan warisan budaya bangsa Indonesia pada masyarakat internasional. Keberhasilan Taman Nasional Komodo di Tenggara Timur, yang secara resmi ditetapkan sebagai akhirnya resmi akan menjadi satu dari tujuh keajaiban dunia (<http://travel.kompas.com/2012/05/16/18073330/Komodo.Resmi.Jadi.New.7.Wonders.of.Nature>, tgl 9 Februari 2012).

New 7 Wonders of Nature yang ditetapkan pada Mei 2012, adalah bukti bahwa komunikasi internasional bangsa Indonesia yang mengekspresikan rasa terhadap warisan leluhur sebagai upaya melembagakan produk seni maupun lingkungan budaya Indonesia.

Hal-hal yang melembagakan nilai-nilai budaya serta produk hasil seni maupun peradaban manusia merupakan masalah krusial yang bisa diselesaikan melalui komunikasi internasional transparan yang mengusung global untuk warga dunia dengan menggunakan berbagai media ataupun teknologi internasional yang didukung oleh teknologi komunikasi. Komunikasi internasional yang efektif selain bermanfaat untuk menyuarakan pesan kepada masyarakat internasional juga sebagai tindakan untuk mengimbangi kekuatan dominasi dunia yang didominasi oleh negara-negara maju dan sekutunya.

Komunikasi internasional memiliki peran yang penting dalam upaya melembagakan kebudayaan dan produk budaya bangsa. Namun tidak mudah menyampaikan pesan kepada masyarakat internasional, jika informasi yang difusikan tidak mengandung kebenaran dan bukti faktual meyakinkan. Terlebih lagi, negara-negara maju dan sekutunya seringkali tidak memberikan berbagai macam pesan yang dikeluarkan oleh masyarakat, tetapi maupun berbagai entitas public yang ada di negara berkembang. Kehilangan ekonomi memang berimbang pada penguasaan komunikasi dan teknologi dunia.

Oleh sebab itu, untuk membangun komunikasi internasional yang bersifat benar dalam mengeksplorasi budaya Indonesia, masyarakat dan institusi yang bertanggungjawab terhadap budaya Indonesia harus

memanfaatkan saluran komunikasi internasional yang secara prinsip terjadi diantara bangsa-bangsa di dunia yang memiliki karakter berbeda.

Pelembagaan budaya secara formal sebagai milik bangsa Indonesia melalui komunikasi internasional, menjadi sangat penting, ketika budaya ataupun produk ekspresi budaya Indonesia diklaim oleh negara tetangga sebagai kebudayaan asli mereka.

Daftar Pustaka

- Chirot, Daniel. 1983. *Social Change in Peripheral Society : The Creation of Balkan Colony*, New York : Academy Press.
- Chomsky, Noam. 2006. *Failed State: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*. Henry Holt and Company, New York: Metropolitan Books
- Dennett, Charlotte. 2006. "Perang Melawan Teror dan Permainan Besar Minyak Bagaimana Media Kehilangan Konsteks". Dalam Kristina Borjesson (ed.) *Mesin Penindas Pers: Membongkar Kebebasan Pers di Amerika*, 71-106. Bandung: Q-Press
- Henderson, Conway W. 1998. *International Relations: Conflict and Cooperation at The Turn of The 21st Century*. Boston: McGraw Hill
- MacBride, Sean. 1983. *Communication and Society, Today and Tomorrow : Many Voices One World*, London, Kogan Page.
- Majalah Tempo, 10 Februari 2013
- Suwarssono dan Alvin Y. So. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Penerbit LP3ES.
- <http://www.antaranews.com/berita/317054/2007-2012-malaysia-klaim-tujuh-budaya-indonesia>
- <http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/19/1747119/Dalam.5.Tahun.Malaysia.7.Kali.Klaim.Budaya.Indonesia>
- <http://health.kompas.com/read/2011/11/05/02350997/Komodo.Belum.Menang.Sudah.Ribut>
- <http://forum.kompas.com/nasional/106600-inilah-daftar-kebudayaan-indonesia-yang-diklaim-malaysia.html>
- <http://www.antaranews.com/berita/1251213425/sultan-produk-budaya-idealnya-dipatenkan-internasional>
- <http://travel.kompas.com/read/2012/05/16/18073330/Komodo.Resmi.Jadi.New.7.Wonders.of.Nature>

adalah Ketua Bidang Litbang ASPIKOM dan Asesor BAN PT. Aktif menulis book chapter yang diterbitkan oleh ASPIKOM, UAJY, UNISBA, UMB, UKSW, UPH, UMS dan UNIBRAW.

Reuben Reynold Sihite. Kelahiran Riau, 12 April 1977. Mengajar di Universitas Satyagama Jakarta sejak tahun 2002. Juga menjadi wartawan Media Nusantara sejak 2003. Lulusan S2 Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana Jakarta. S1 Hubungan Internasional pada Universitas Satyagama Jakarta. Pernah mengikuti *Training of Trainer (ToT) Media Literacy* Dewan Pers (2010), Kursus Bahasa Mandarin LPMIK CHP (2004), Pelatihan Pustakawan STT Jakarta (2004). e-mail: artikelruben@yahoo.com



Dr. Eko Harry Susanto, M.Si. Lahir di Pekalongan, 4 April 1958. Saat ini menjadi Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara Jakarta. Lulus dari Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jurusan Ilmu Pemerintahan (1981), Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia Jakarta (1996), dan Program Doktor Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran Bandung (2004). Selain mengajar juga aktif menulis artikel, saat ini sudah 72 opini dimuat dalam surat kabar nasional. Menulis dua buku komunikasi secara individu dan 15 buku bersama penulis lain. Selain itu sering memberikan ceramah, workshop dan berbagai pelatihan di bidang Public Relations, Kepuasan Pelanggan dan Komunikasi Publik. Sejak tahun 2007 menjabat Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM). Aktif dalam lingkaran diskusi Keterbukaan Informasi Publik. e-mail: ekohs@centrin.net.id, ekoharry@yahoo.com, blog: www.ekoharrysusanto.wordpress.com



Mansur Juned menyelesaikan pendidikan master pada jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia (2008). Gelar S1 dari Teologi Islam UIN Syarief Hidayatullah Jakarta (2003). Pernah menjadi editor pada Penerbit Almahira (2004-2005) dan Erlangga (2005-2009). Sejak tahun 2009 mengajar di Universitas Paramadina Jakarta dan Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta. Beberapa karya publikasi antara lain: "The Indonesian Wave in Malaysia: Strengthening 'Blood Brotherhood'?" (*Proceeding International Conference*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2012), "Revitalisasi Hubungan Luar Negeri India-ASEAN Melalui Kebijakan Look East Policy," (*Jurnal Peradaban Global*, Universitas Paramadina, 2012). Berminat pada kajian keamanan di kawasan Asia-Pasifik, Ekonomi Politik dan Kebijakan

